



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINPARBUDAYA TAHUN 2024



**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA**



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan, petunjuk serta hidayah-Nya sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan baik

Ranwal Renja memuat tentang capaian, sasaran, target, indikator yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran periode Tahun 2024 serta merupakan bentuk sinkronisasi tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2024-2026, sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dilaksanakan sesuai dengan sistem perencanaan yang sistematis dan integral.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Ranwal Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, *aamiin ya robbal 'alamin*.

Sungailiat, Desember 2022

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka



Rismy Wiramadonnah, S.STP, M.Si
NIP.19830324 200112 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
 TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra perangkat Daerah	7
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	37
2.4 Review terhadap Ranwal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	47
3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
4.1 Rencana Kerja dan Pendaan Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan tahun 2023	54
BAB V PENUTUP	65



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.1 Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Kegiatan Dinparbudaya Kabupaten Bangka Tahun 20228

TABEL 2.1.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2021 di Dinparbudaya Kabupaten Bangka11

TABEL 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di Dinparbudaya Kabupaten Bangka32

TABEL 2.2.2 Target dan Capaian Kinerja Dinparbudaya34

TABEL 2.4 Review Rancangan Awal Program Kegiatan, Sub Kegiatan Dinparbudaya Serta Target dan Pendanaan Tahun 202437

TABEL 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di Dinparbudaya Kabupaten Bangka43

TABEL 3.2.1 Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-202648

TABEL 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinparbudaya Tahun 202448

TABEL 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinparbudaya Tahun 2024.....49

TABEL 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Laju Tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka sesuai dengan Kepmendagri Nomor : 050-5899 Tahun 202155

BAB I
PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja

Berpedoman pada Grand Strategy yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka memfokuskan program dan kegiatan pada peningkatan sumber daya manusia, mewujudkan pemerintahan yang amanah dan menumbuhkan kembangkan ekonomi rakyat melalui Program Pariwisata dan Kebudayaan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2024 ini berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, mengacu pada kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2024-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2024 akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024, sebagai bagian dari dokumen RAPBD Kab. Bangka Tahun 2024. Selanjutnya setelah melalui tahapan proses, akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2024.

Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Perubahan Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 95 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan bupati Bangka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A Kabupaten Bangka.
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44)



1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini adalah :

1. sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka,
2. memastikan tersusunnya langkah yang integral, komprehensif, terarah dan sistematis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan,
3. agar dokumen yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Rarenja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan, serta
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra perangkat Daerah,
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,



- 2.3 Isu isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi,
- 2.4 Review terhadap Ranwal RKPD, dan
- 2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional,
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendaan Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan tahun 2023.

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINPARBUDYA TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPARBUDAYA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Dinparbudaya Tahun 2018 – 2023 dan Reviu Tahun 2021 - 2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Terkait dengan kinerja urusan Pariwisata dan Kebudayaan, Berdasarkan Rencana Strategis DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023, Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 disusun dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Tujuan pembangunan jangka menengah DINPARBUDAYA yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2019-2023 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bangka Sebagai Gerbang kota Pariwisata Berskala Internasional”

Adapun pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka merupakan upaya pencapaian Rencana Strategis yang telah disusun, untuk rencana kerja tahun 2024 merupakan upaya pencapaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun Pertama dalam Renstra 2024-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2022, dengan ruang lingkup program dan kegiatan sebagai berikut :



TABEL 2.1.1
LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DINPARBUDAYA KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)	REALISASI				KET
			%fisik	KEU (Rp)	% Keu	SISA DANA	
1	2	3	4	5		7	8
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.518.391.700	100,00	5.383.575.733	82,59	1.134.815.967	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	100,00	34.936.505	99,82	63.495	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	100,00	24.968.249	99,87	31.751	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	100,00	9.968.256	99,68	31.744	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.340.732.700	100,00	3.294.880.474	75,91	1.045.852.226	•
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.340.732.700	100,00	3.294.880.474	75,91	1.045.852.226	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.800.000	100,00	9.799.008	99,99	992	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.800.000	100,00	9.799.008	99,99	992	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.551.000	100,00	235.261.941	99,46	1.289.059	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.551.000	100,00	235.261.941	99,46	1.289.059	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.583.900	100,00	39.648.000	70,07	16.935.900	•
	Pengadaan Mebel	29.631.200	100,00	29.198.000	98,54	433.200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.952.700	100,00	10.450.000	38,77	16.502.700	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.648.620	100,00	1.461.238.260	96,22	57.410.360	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.366.401.540	100,00	1.335.441.548	97,73	30.959.992	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.179.000	100,00	63.116.082	71,58	25.062.918	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.068.080	100,00	62.680.630	97,83	1.387.450	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.075.480	100,00	307.811.545	95,87	13.263.935	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.344.280	100,00	133.495.342	91,85	11.848.938	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.501.200	100,00	44.873.203	98,62	627.997	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.230.000	100,00	129.443.000	99,40	787.000	
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	875.580.000	100,00	774.098.030	88,41	101.481.970	
2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	727.970.000	100,00	627.198.030	86,16	100.771.970	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	241.970.000	100,00	237.198.030	98,03	4.771.970	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	486.000.000	100,00	390.000.000	80,25	96.000.000	



NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)	REALISASI				KET
			%fisik	KEU (Rp)	% Keu	SISA DANA	
1	2	3	4	5		7	8
2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	147.610.000	100,00	146.900.000	99,52	710.000	
	<i>Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan</i>	147.610.000	100,00	146.900.000	99,52	710.000	
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	126.184.890	100,00	119.900.780	95,02	6.284.110	
3.1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	126.184.890	100,00	119.900.780	95,02	6.284.110	
	<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	126.184.890	100,00	119.900.780	95,02	6.284.110	
4.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.659.906.482	100,00	4.883.245.843	73,32	1.776.660.639	
4.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	715.738.960	100,00	682.885.813	95,41	32.853.147	
	<i>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	715.738.960	100,00	682.885.813	95,41	32.853.147	
4.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	467.651.380	100,00	461.183.610	98,62	6.467.770	
	<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	467.651.380	100,00	461.183.610	98,62	6.467.770	
4.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.476.516.142	100,00	3.739.176.420	68,28	1.737.339.722	•
	<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	5.226.755.000	100,00	3.496.792.600	66,90	1.729.962.400	DAK FISIK
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	249.761.142	100,00	242.383.820	97,05	7.377.322	DAK NON FISIK
5.	Program Pemasaran Pariwisata	602.730.000	100,00	579.323.628	96,12	23.406.372	
5.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	602.730.000	100,00	579.323.628	96,12	23.406.372	
	<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	102.730.000	100,00	100.293.900	97,63	2.436.100	
	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	500.000.000	100,00	479.029.728	95,81	20.970.272	
6.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	824.635.558	100,00	772.785.263	93,71	51.850.295	
6.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	824.635.558	100,00	772.785.263	93,71	51.850.295	
	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	150.000.000	100,00	136.097.081	90,73	13.902.919	
	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	624.402.858	100,00	587.697.782	94,12	36.705.076	DAK NON FISIK



NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)	REALISASI				KET
			%fisik	KEU (Rp)	% Keu	SISA DANA	
1	2	3	4	5		7	8
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50.232.700	100,00	48.990.400	97,53	1.242.300	
	JUMLAH	15.607.428.630	100,00	12.512.929.277	80,17	3.094.499.353	

Sumber : Laporan Keuangan Dinparbudaya Tahun 2022

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 80,00 %, yaitu terdiri dari :

- 2 (dua) kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukan bahwa Dinparbudaya Kabupaten Bangka pada Tahun Anggaran 2022 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan.
- 1 (satu) kegiatan dari Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, yaitu kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Bahwa pada program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, output kegiatan berupa peningkatan sarana dan prasarana amenitas dan atraksi pariwisata (DAK FISIK) bidang pariwisata yang awal penganggarannya disesuaikan dengan surat Menteri Keuangan. Namun pada masa sinkronisasi dan harmonisasi besaran anggaran tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp 1.705.000.000 dikarenakan kesiapan dokumen yang belum sesuai persyaratan oleh tim validasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pengurangan anggaran sesuai hasil sinkronisasi tidak serta merta dapat dihapuskan pada anggaran APBD yang menyebabkan masih teralokasikannya pada anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, berkaitan dengan hal tersebut proses penyerapan anggaran pada program dimaksud tidak dapat dimaksimalkan sebagaimana mestinya.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2022, maka perlu dicermati kembali Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 berdasarkan pada *outcome* setiap program sesuai dengan Formulir Evaluasi Pada Permendagri No.86 Tahun 2017.



Tabel 2.1.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
S.D Tahun 2021 Di DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	2.2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
						HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	A (81,20)			BB (73,25)				
2	2.2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
						Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,37 %	28	29	26,37	0,91	28,15	82,52	301
						Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	16,90 %	12,2	12,9	16,88	1,31	11,50	40,58	240
						Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0 %	0	0	100%	100,00	0%	100,00	100,00
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60 %	60	70	60	0,00	60	180,00	3



							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3	Nilai	0	N/a	0%	0,00	0%	0,00	0%
							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	%	100	100	100	100	100	300,00	300
2	2.2	01	2	01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100	100	300,00	300
							Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	300,00	300
2	2.2	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja Perangkat Daerah	14	Dokumen	10	18	18	100	25	53,00	379
2	2.2	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	Dokumen	24	12	12	100	19	55,00	393
2	2.2	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	300,00	300
2	2.2	01	2	02	01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	orang	32	32	32	100	32	96,00	300
2	2.2	01	2	02	03	Sub kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	12	12	100	12	36,00	300



2	2.2	01	2	02	07	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	18 laporan	18	18	18	100	18	54,00	300
2	2.2	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap	100 %	100	100	100	100	100	300,00	300
							persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	100	100	100	100	100	300,00	300
							persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 %		0	0	0	15,63	15,63	31,26
2	2.2	01	2	05	02	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket (pakaian olahraga 16 stel, pdh 82 stel)	2	2	2	100	2	6,00	300
2	2.2	01	2	05	03	Sub Kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11	33	33	100	11	55,00	500
2	2.2	01	2	05	09	Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang	0	0	0	0	34	34,00	212,5
2	2.2	01	2	06		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	100	100	100	100	100	300,00	300
2	2.2	01	2	06	09	Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12	12	12	100	12	36,00	300



2	2.2	01	2	06	10	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	12	12	100	12	36,00	300
2	2.2	01	2	06	11	Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	12	12	12	100	12	36,00	300
2	2.2	01	2	08		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100	100	300,00	300
2	2.2	01	2	08	01	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	12	12	100	12	36,00	300
2	2.2	01	2	08	02	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	12	12	100	12	36,00	300
2	2.2	01	2	08	04	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	12	12	100	12	36,00	300
2	2.2	01	2	07		Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	5	%	0	4	4	100	4	8,00	160
2	2.2	01	2	07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	unit	0	0	0	0	1	1,00	100
2	2.2	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	59	unit	0	2	2	100	53	55,00	93
2	2.2	01	2	07	06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15	unit	0	10	10	100	29	39,00	260
2	2.2	01	2	09		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	%	100	100	100	100	100	300,00	300



2	2.2	01	2	09	02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit (2 unit mobil, 6 unit motor)	8	8	8	100	8	24,00	300
2	2.2	01	2	09	06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50	50	50	100	50	150,00	300
2	2.2	01	2	09	09	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1	2	2	100	2	5,00	250
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	indeks perlindungan budaya	74,43 %	51,97	51,97	51,97	100	74,43	178,37	240
							indeks pengembangan budaya	75,00 %	35,80	35,80	35,80	100	74,00	145,60	194
							indeks pemanfaatan budaya	60,54 %	10,35	10,35	10,35	100	60,00	80,70	133
2	22	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Objek Budaya yang dinventarisir	76,2 %	70,56	73,89	73,89	100	73,89	218,34	287
							% Objek Budaya yang direstorasi	74,05 %	70,24	74,05	74,05	100	74,05	218,34	295
							% Budaya yang dilestarikan	80 %		80	80	100	80	160,00	200
2	22	02	2	01	01	sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	19 objek	19	19	19	100	19	57,00	300
2	22	02	2	01	02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	3 orang	3	3	3	100	3	9,00	300
2	22	02	2	02		Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Seni yang dilestarikan	80 %	0	80	80	100	80	160,00	200
							% Kelompok Seni yang Berprestasi	81,57 %	72,8	81,57	81,57	100	81,57	235,94	289



2	22	02	2	02	01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	4 objek	4	4	4	100	4	12,00	300
2	22	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	12 laporan	12	12	12	100	12	36,00	300
2	22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Lembaga Adat yang dibina	100 %	0	0	0	0	0	0,00	0
2	22	02	2	03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	200 orang	0	0	0	0	0	0,00	0
2	22	02	2	03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 unit	0	0	0	0	0	0,00	0
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Indeks perlindungan budaya	74,43 %	68,67	68,67	68,67	100	74,43	211,77	285
2	22	05	2	02		Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	% Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	62,41 %	50,18	62,41	62,41	100	62,41	175,00	280
2	22	05	2	02	01	Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 objek	13	13	13	100	13	39,00	300
2	22	05	2	02	02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 objek	2	2	2	100	2	6,00	300
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA KAB/KOTA	Indeks Destinasi Pariwisata	77,53 %	70,11	77,53	73,56	94,87940152	77,53	221,20	285



3	26	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata	83 %	72	77	77	100	77	226,00	272
							Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan	88 %	83	83	83	100	86	252,00	286
3	26	02	2	01	03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	6 lokasi	6	6	6	100	6	18,00	300
3	26	02	2	01	04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	1	1	100	1	3,00	300
3	26	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	77,12 %	72,36	77,12	77,12	100	77,12	226,60	294
							Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	54,11 %	53,09	54,11	54,11	100	54,11	161,31	298
3	26	02	2	02	04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia dan Terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	4 unit	4	4	4	100	4	12,00	300
3	26	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	77,12 %	72,36	77,12	77,12	100	77,12	226,60	294
							Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	54,11 %	53,09	54,11	54,11	100	54,11	161,31	298



3	26	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kepulauan Bangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 unit	1	1	1	1	100	1	3,00	300
3	26	02	2	03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	26	02	2	03	06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	3 laporan	3	3	3	3	100	1	7,00	233
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Indeks Pemasaran Pariwisata	63,51 %	63,51	63,51	63,51	100	63,51	190,53	300	
3	26	03	2	01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Ketertarikan atas Produk Wisata	79,93 %	70,04	74,77	74,77	100	79,93	224,74	281	
							Persentase Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif	75,05 %	60,37	70,12	70,12	100	75,05	205,54	274	
							Persentase Tindakan atas Produk Wisata	75,63 %	60,11	70,89	70,89	100	75,63	206,63	273	
3	26	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri/	2,00 Dokumen	2,00	2,00	2,00	100	2,00	6,00	300	
3	26	03	2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri	3,00 laporan	3,00	3,00	3,00	100	3,00	9,00	300	



3	26	03	2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2,00	Dokumen	0	0	0	0	2,00	2,00	100
3	26	04				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Indeks Kemitraan Pariwisata	78,36	%	68,14	78,36	78,36	100	78,36	224,86	287
3	26	04	2	01	01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) yang tersedia	12,5	%	0	0	0	0	12,5	12,50	100
3	26	04	2	01	01	Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 unit	unit	0	0	0	0	0	0,00	0
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Indeks Kemitraan Pariwisata	78,36	%	68,14	78,36	78,36	100	78,36	224,86	287
3	26	05	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Desa Wisata yang Atraktif	90,12	%	70,36	70,36	70,36	100	90,12	230,84	256
							Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif	91,67	%	70	70	70	100	91,67	231,67	253
							Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	80,23	%	64,83	64,83	64,83	100	80,23	209,89	262
							Persentase Peningkatan Serifikat Kompetensi Bidang	79,77	%	60,85	60,85	60,85	100	79,77	201,47	253



							Pariwisata								
3	26	05	2	01	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya.	30 orang	30	30	30	100	30	90,00	300
3	26	05	2	01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	160 orang	160	160	160	100	160	480,00	300
3	26	05	2	01	03	Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa).	40 orang	40	40	40	100	40	120,00	300
3	26	05	2	01	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1	1	1	100	1	3,00	300



Sedangkan untuk tahun berjalan yakni di awal tahun anggaran 2023 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 10.108.260.520,00 untuk 6 program, 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan estimasi capaian fisik dan keuangan sebesar 100 % serta tetap memperhatikan azas efektif dan efisien anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- a. Masih Terdapat Usulan Kegiatan yang Setelah Diinventarisasi Belum Sesuai Dengan Rencana Kegiatan yang Telah Dicanangkan Pada Renstra maupun Renja DINPARBUDAYA.
- b. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DINPARBUDAYA Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung Secara Optimal baik dari anggaran pelaksanaan kegiatan sampai dengan ketersediaan fasilitas pendukung, Sehingga Berpengaruh Terhadap upaya pencapaian sasaran strategis lingkup pariwisata dan kebudayaan.
- c. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur Pariwisata dan budaya di DINPARBUDAYA sehingga berimbas terhadap kualitas layanan dan pencapaian indikator sasaran.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, maka pada tahun 2024 DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka menyusun Strategi:

- a. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
- b. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk wisata
- c. Meningkatkan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- d. Meningkatkan In Take Promotion
- e. Membentuk Desa Wisata di Setiap kecamatan
- f. Peningkatan Sarana Prasarana Wisata
- g. Meningkatkan Pelestarian Adat Budaya Daerah

Dengan Arah kebijakan Sebagai Berikut :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku di bidang pariwisata;
2. Meningkatkan pembekalan teknis di bidang produk;
3. Meningkatkan pembinaan SDM dan penerapan sertifikasi usaha kepariwisataan;
4. Memperbanyak even berskala regional, nasional dan internasional;



5. Meningkatkan dukungan terhadap kegiatan yang berskala regional, nasional dan internasional;
6. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap organisasi pokdarwis;
7. Melakukan penggalian bakat dan pembinaan budaya daerah;
8. Memberikan insentif terhadap para pelaku seni dan sejarawan;
9. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan festival budaya daerah;
10. Pelatihan dan sertifikasi bagi sejarawan dan tim ahli cagar budaya;
11. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan kebudayaan yang memadai.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DINPARBUDAYA) merupakan unsur Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor Peraturan Bupati Nomor 95 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan bupati bangka nomor 74 tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka tersebut diatas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaanyang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Destinasi Pariwisata,Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;



- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pembinaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

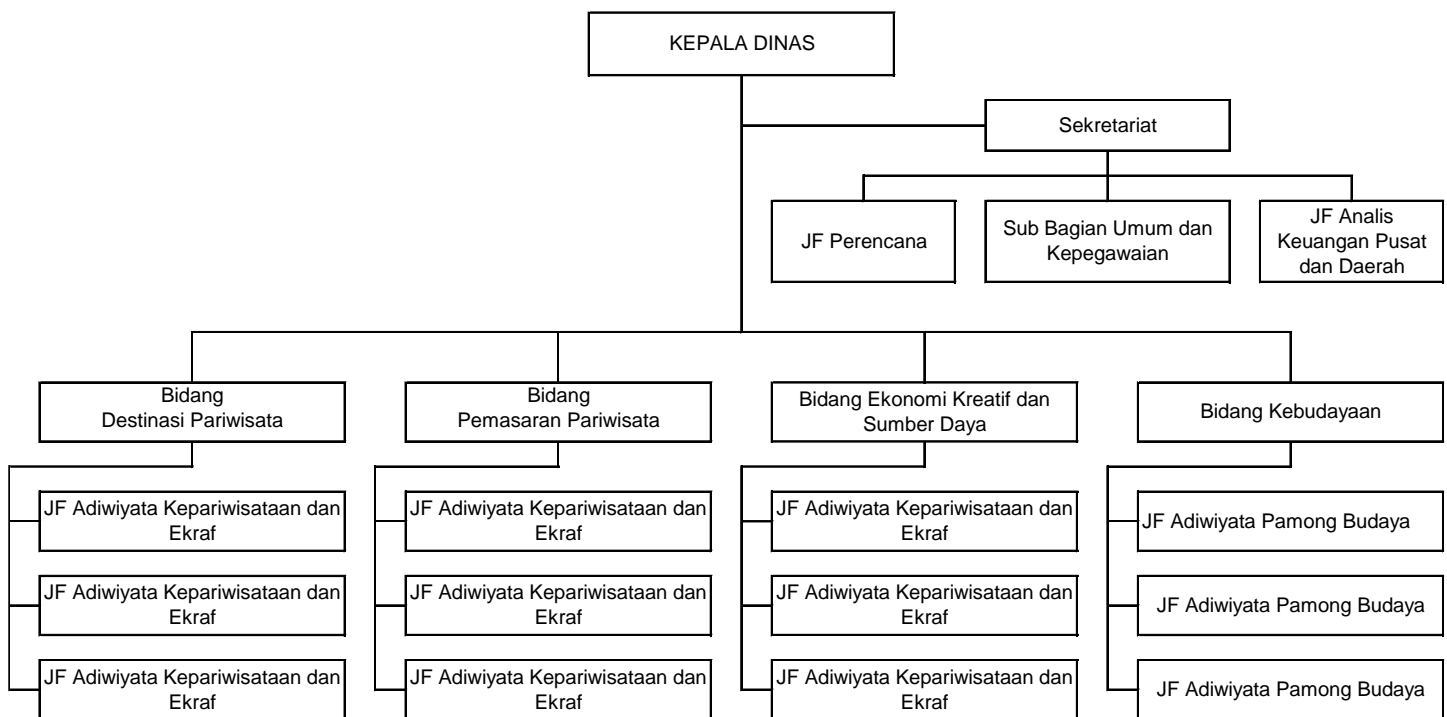
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaiandan kelompok jabatan fungsional.
3. Bidang Destinasi Pariwisata, yang membawahi kelompok jabatan fungsional adiwiyata kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
4. Bidang Pemasaran Pariwisata yang membawahi kelompok jabatan fungsional adiwiyata kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
5. Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya, yang membawahi kelompok jabatan fungsional adiwiyata kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
6. Bidang Kebudayaan, yang membawahi kelompok jabatan fungsional Pamong Budaya.



Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka





Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Kepala Dinas :**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya

➤ **Sekretaris :**

Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
4. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata, dan Kebudayaan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
6. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan ;



7. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
8. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** , mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - 3) Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - 4) Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - 5) Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
 - 6) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
 - 7) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
 - 8) Mengendalikan arsip aktif;
 - 9) Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
 - 10) Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor
 - 11) Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
 - 12) Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
 - 13) Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;



- 14) Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- 17) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Bidang Destinasi Pariwisata**

Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang produk dan objek wisata sarana prasarana, dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Destinasi Pariwisata;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/dunia usaha ;
- c. Pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi terhadap pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan destinasi pariwisata;
- f. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah;
- h. Penyusunan dan penyampaian usulan rencana dan program sarana dan prasarana ;
- i. Penyusunan dan penyampaian usul pengadaan, pemeliharaan dan perawatan serta perlindungan potensi produk dan objek wisata;
- j. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan



- m. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Destinasi Pariwisata :

- a. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Adiwiyata Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

- **Bidang Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang promosi, usaha dan kemitraan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- b. Pelaksanaan pengkajian bidang pemasaran, usaha pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
- c. Pelaksanaan dan pengembangan pemasaran/promosi, usaha pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi bidang pariwisata;
- e. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pemasaran, usaha pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
- f. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata skala Daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Struktur Bidang Pemasaran Pariwisata:**

- a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Adiwiyata Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif



- **Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya**

Bidang Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi kreatif dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat sadar wisata dan pelaku ekonomi Kreatif;
- c. Pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SDM Kepariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata ;
- e. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah;
- g. Penyusunan dan penyampaian usulan rencana dan program pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata;
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Struktur Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya yakni:

- a. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Adiwiyata Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

- **Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kesenian, cagar budaya, museum, sejarah dan tradisi.



Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya Daerah dan museum Daerah, pembinaan dan perizinan perfilman Daerah, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar Daerah, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Kebudayaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Bidang Kebudayaan ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka selaras dengan tujuan kabupaten, yaitu :

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan, indikator tujuan Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Nilai) dengan sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan dan indikator Spending Of Money”

Kemudian DINPARBUDAYA membuat sasaran strategis guna upaya mencapai Indikator Kinerja penyelenggaran Pemerintah Daerah tersebut yang diantaranya yakni :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinparbudaya dengan Indikator Hasil evaluasi AKIP dan Hasil temuan pengelolaan DINPARBUD dalam LHP-BPKRI yang ditindaklanjuti
2. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan rata rata lama tinggal wisatawan dengan sasaran program meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan indikator Indeks Destinasi Pariwisata, meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisatadengan indikator Indeks Pemasaran Pariwisata, Meningkatnya Pengembangan Kemitraan Pariwisatadengan indikator Indeks Kemitraan dan Ekonomi Kreatif Pariwisata.
3. Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah dengan Indikator Indeks Pelestarian Budaya Daerah dengan sasaran Program Meningkatnya Perlindungan Budaya dengan Indikator Indeks Perlindungan Budaya, Meningkatnya Pengembangan Budaya dengan Indikator Indeks Pengembangan Budaya dan Meningkatnya Pemanfaatan Budaya Daerah dengan Indikator Indeks Pemanfaatan Budaya.

Berikut Pencapaian Target Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka pada awal dokumen Rencana Strategis 2019 sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan tahun 2024.



Tabel 2.2.1

T-C. 30.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di Dinparbudaya Kabupaten Bangka

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Akuntabiitas Kinerja Dinparbudaya	-	Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	A	BB	-	BB	A	A	
			Hasil temuan pengelolaan DINPARBUD dalam LHP-BPK-RI yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	-	persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	-	4,74%	5,00 %	5,00 %	-	2,4 %	7,16 %	5,00 %	4,74%	
			rata rata lama tinggal wisatawan	-	2,46 Hari	2,5 Hari	2,64 Hari	-	1,4 Hari	2,35 Hari	2,64 Hari	2,46 Hari	
3.	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	-	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	-	70,43 %	74,59 %	83,04 %	-	21,3 %	34,63 %	83,04 %	70,43	

Sumber : LAKIN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, 2021



Secara keseluruhan target dan realisasi capaian kinerja serta capaian kinerja tahun ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dan terdapat perubahan terhadap target kinerja dimana pada tahun 2021 merupakan awal perhitungan menggunakan Reviu Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setelah sebelumnya mengalami perubahan nomenkelatur dan perubahan urusan dari tahun 2020 dan 2019 yang sebelumnya bernama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dengan urusan Pariwisata dan urusan pemuda dan olahraga adapun realisasinya sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :



Tabel 2.2.2
Target dan Capaian Kinerja DINPARBUDAYA
Tahun 2019-2022

No.	Sasaran		Indikator	Kinerja											
	2019-2020	2021-2022		Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinparbudaya		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100
2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara		Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara	86.577	100.345	115,9	90.364	91.558	101,3	-	-	-	-	-	-
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	334	350	104,8	384	5	1,3	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,62	1,62	100,0	1,62	0,97	59,9	-	-	-	-	-	-
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Manca Negara	2,25	2,25	100,0	2,25	0,12	5,3	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Pemuda Daerah		persentase pemuda yang berjiwa kepemimpinan, berwirausaha dan berorganisasi	3	3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga Pelajar dan Mahasiswa		Persentase Kabupaten Bangka dalam Event Keolahragaan SD tingkat Provinsi	91,3	100	109,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kabupaten Bangka dalam Event	91,3	80	87,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-



			Keolahragaan SMP tingkat Provinsi												
No.	Sasaran		Indikator	Kinerja											
	2019-2020	2021-2022		Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
6	Meningkatnya Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Adat Budaya Daerah		Persentase Adat Budaya Daerah yang dilestarikan	-	-	-	40	13,33	33,3	-	-	-	-	-	-
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Budaya		Pelaku Seni Budaya yang Aktif	-	-	-	70	107,54	153,6	-	-	-	-	-	-
1		MENINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100
			Hasil Temuan BPKP yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-
2		MENINGKATNYA PELESTARIAN BUDAYA DAERAH	INDEKS PELESTARIAN BUDAYA DAERAH	-	-	-	-	-	-	70,43	21,3	30,2	74,59	34,63	46,427
3		MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DAN RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN	% PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN	-	-	-	-	-	-	4,74	2,4	50,6	5	7,16	143,2
			RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN	-	-	-	-	-	-	2,46	1,4	56,9	2,5	2,35	94

Dalam urusan Kebudayaan dari sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah dalam target yang telah ditetapkan dalam rewiu Renstra sebesar 74,59% realisasinya sebesar 34,63% ataupun tidak tercapai dikarenakan berbagai kegiatan dalam program pelestarian budaya daerah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran dan upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penanggulangan pandemi COVID 19 yang melibatkan masyarakat hal ini juga dapat dilihat pada tahun 2019-2021 yang juga tidak tercapai, namun persentase capaiannya meningkat dari tahun 2021 dengan capaian sebesar 30,2%.

Sedangkan untuk urusan pariwisata sasaran kegiatan yakni dilihat dari rata rata lama tinggal wisatawan yang tidak tercapai pada tahun 2022 yaitu dengan capaian sebesar 94% dikarenakan banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung lebih memilih untuk tinggal di Kotamadya Pangkalpinang atau Kabupaten Belitung

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINPARBUDAYA

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinparbudaya tetap mempertimbangkan isu isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh perkembangan pembangunan pariwisata dan perkembangan pembangunan kebudayaan disamping juga keterbatasan kualitas SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi OPD dari faktor-faktor internal dan eksternal lainnya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi pelayanan DINPARBUD Kabupaten Bangka sebagai Fasilitas Kegiatan Pariwisata, Dan Kebudayaan;
2. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pariwisata, Dan Kebudayaan;
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan Pariwisata dan Kebudayaan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi Kepariwisata, dan Kebudayaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan Kepariwisata, dan Kebudayaan tahunan;
4. Menurunnya kualitas objek wisata akibat masih banyaknya penambangan timah ilegal yang beroperasi disekitar objek wisata;
5. Masih Minimnya data tentang Kebudayaan ;



- 6. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan;
- 7. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- 8. Masih minimnya pembinaan dan penghargaan terhadap pelaku budaya;
- 9. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah propinsi Dengan SKPD Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 10. Keterbatasan dana yang ada ditingkat kabupaten maupun Propinsi mengakibatkan penundaan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasaran pariwisata dan kebudayaan;
- 11. Proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik belum terjalin sinergisitas;
- 12. Sulitnya mencapai target pembangunan bersama secara sinergis dan berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan K/L;
- 13. Tuntutan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat diartikulasikan oleh SKPD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Review Rancangan Awal Program, Kegiatan , Subkegiatan DINPARBUDAYA
serta Target dan Pendanaan Tahun 2024

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Target	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			8.783.588.662
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,37%	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	16,90%	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal	3	



		Perangkat Daerah		
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100,00%	150.000.000
		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100,00%	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen	75.000.000
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 dokumen	75.000.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100,00%	4.315.532.700
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4.210.532.700
1.2.2	Sub kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	55.000.000
1.2.3	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	18 laporan	50.000.000
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap	100,00%	314.600.000
		persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100,00%	
		persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50%	
1.3.1	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket (pakaian olahraga 16 stel, pdh 82 stel)	81.600.000
1.3.2	Sub Kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 dokumen	36.500.000
1.3.3	Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang	196.500.000
1.4	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100,00%	450.000.000
1.4.1	Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	250.000.000



1.4.2	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	50.000.000
1.4.3	Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	150.000.000
1.5	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100,00%	1.703.455.962
1.5.1	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.503.455.962
1.5.2	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100.000.000
1.5.3	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100.000.000
1.6	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	5,00%	950.000.000
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	400.000.000
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	59 unit	250.000.000
1.6.3	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	300.000.000
1.7	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100,00%	900.000.000
1.7.1	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit (2 unit mobil, 1 unit motor)	150.000.000
1.7.2	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	250.000.000
1.7.3	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	500.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	indeks perlindungan budaya	74,43	3.275.000.000
		indeks pengembangan budaya	75,00	
		indeks pemanfaatan budaya	60,54	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Objek Budaya yang dinventarisir	76,20%	1.100.000.000
		% Objek Budaya yang direstorasi	74%	
		% Budaya yang dilestarikan	80%	
2.1.1	sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	19 objek	900.000.000



2.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	3 orang	200.000.000
2.2	Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Seni yang dilestarikan % Kelompok Seni yang Berprestasi	80,00% 81,57%	1.225.000.000
2.2.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	4 objek	470.000.000
2.2.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	12 laporan	755.000.000
2.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Lembaga Adat yang dibina	100,00%	950.000.000
2.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	200 orang	350.000.000
2.3.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 unit	600.000.000
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Indeks perlindungan budaya	74,43	700.000.000
3.1	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	% Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	62,41	700.000.000
3.1.1	Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 Objek	350.000.000
3.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	350.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA KAB/KOTA	Indeks Destinasi Pariwisata	77,53	3.750.000.000
4.1	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan	83 88	2.350.000.000
4.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematapan, revitalisasi)	6 Lokasi	2.200.000.000
4.1.2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000
4.2	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	77,12 54,11	350.000.000



4.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasaran yang tersedia dan Terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	4 unit	350.000.000
4.3	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	77,12	1.050.000.000
		Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	54,11	
4.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	500.000.000
4.3.2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000
4.3.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Laporan	450.000.000
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Indeks Pemasaran Pariwisata	63,51	3.400.000.000
5.1	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Ketertarikan atas Produk Wisata	79,93	3.400.000.000
		Persentase Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif	75,05	
		Persentase Tindakan atas Produk Wisata	75,63	
5.1.1	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri/	2 dokumen	800.000.000
5.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri	3 laporan	1.300.000.000
5.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	1.300.000.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Indeks Kemitraan Pariwisata	78,36	300.000.000
6.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) yang tersedia	12,5%	300.000.000
6.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 unit	300.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Indeks Kemitraan Pariwisata	78,36	1.520.000.000



7.1	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Desa Wisata yang Atraktif	90,12	1.520.000.000
		Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif	91,67	
		Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	80,23	
		Persentase Peningkatan Serifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	79,77	
7.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya.	30 orang	300.000.000
7.2	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	160 orang	600.000.000
7.3	Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa).	40 orang	550.000.000
7.4	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	70.000.000
				21.728.588.662



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Berikut adalah tabel Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2023 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka :

Tabel 2.5

T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Mendo Barat, Kemuja	Indeks Perlindungan Budaya		
	Kegiatan Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Mendo Barat, Kemuja			
	Sub kegiatan Pengembangan cagar budaya	Mendo Barat, Kemuja	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang dikembangkan	100.000.000	1 objek
2	Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Tanah Bawah, Puding Besar	Indeks Perlindungan Budaya		
	Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	Tanah Bawah, Puding Besar			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINPARBUDAYA**3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Mengembangkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan Iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukankam dan transformasi pelayanan publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dari Penjabaran 7 agenda prioritas pembangunan Nasional tersebut diatas dilihat dari sektor pariwisata dan kebudayaan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, **pariwisata**, serta **ekonomi kreatif dan digital**.

Dari prioritas ini diketahui bahwa sektor pariwisata yang didalamnya terdapat sektor ekonomi kreatif dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Dari prioritas ini diketahui bahwa perencanaan pengembangan sektor pariwisata pada tiap-tiap pusat pertumbuhan pariwisata di tiap wilayah di kabupaten bangka mampu mendeteksi arah pembangunan pariwisata berdasarkan kewilayahannya sehingga meningkatkan daya saing masyarakat

3. Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola ke pendudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan social;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Pada prioritas ini upaya dinas pariwisata yakni dengan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pariwisata berupa peningkatan skill, pelatihan, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Pada prioritas ini upaya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangka ditekankan pada sektor pariwisata dan kebudayaan dengan menerapkan revolusi mental guna upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Pada prioritas ini upaya yang dilaksanakan yakni dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana infrastruktur pendukung pariwisata dan budaya baik berupa pembangunan fisik, pengelolaan pemasaran pariwisata berbasis digital dan upaya mempermudah investasi dengan mempermudah perizinan pembangunan sektor pariwisata.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan Bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

Pada prioritas ini pembangunan pariwisata ditekankan pada pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai potensi wisata di Kabupaten Bangka.

7. Memperkuat stabilitas dan POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan public yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINPARBUDAYA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan Reviu 2021-2023 serta sasaran strategis rencana pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, antara lain :



Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2024-2026

No	Tujuan Kabupaten	Indikator Tujuan Kabupaten	Sasaran Strategis Kabupaten	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kabupaten
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/Nilai)	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten (Kategori/Nilai)
				Indeks SPBE (Nilai)
				Indeks Profesionalitas ASN (Nilai)
			Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya (Kategori)
2	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Nilai)	Sasaran 4.2: Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	Spending of Money (Miliar Rupiah)

Adapun rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinparbudaya guna mendukung pencapaian strategis rencana pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis DINPARBUDAYA
Tahun 2024

Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024	Definisi Operasional
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokasi	Nilai Evaluasi	23,39	Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan secara mandiri dan direkonsiliasi oleh Inspektorat dengan nilai maksimal 36,30
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi	A (81,20)	
Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan oleh Wisatawan	Spending Of Money (Dalam Miliar Rupiah)		20,00	
Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Persentase	70,43	40% dari IPLB + 30% dari IPGB + 30% dari IPMB
Meningktanya Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persentase	4,74	Jumlah Lalu lintas tamu hotel dan retribusi masuk wisatawan yang mengunjungi daya tarik wisata Tahun N dikurang Lalu lintas Tamu N-1 dibagi Lalu Lintas Tamu N-1 dikali 100%
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,46	Rekapitulasi rata=rata lama menginap wisatawan domestik setiap hotel di bagi jumlah hotel tempat wisatawan domestik menginap



3.3. PROGRAM KEGIATAN DINPARBUDAYA 2024

Rencana Kerja Dinparbudaya Kab. Bangka Tahun 2024 dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 21.728.588.662,00** (Dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian jumlah program dan kegiatan yang direncanakan berjumlah 7 program, 17 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut :

TABEL 3.3
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINPARBUDAYA
TAHUN 2024

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Target	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			8.783.588.662
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,37%	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	16,90%	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100,00%	150.000.000
		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100,00%	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen	75.000.000
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 dokumen	75.000.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100,00%	4.315.532.700
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4.210.532.700
1.2.2	Sub kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	55.000.000
1.2.3	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keu Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	18 laporan	50.000.000
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap	100,00%	314.600.000
		persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100,00%	
		persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50%	
1.3.1	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket (pakaian olah raga 16 stel, pdh 82 stel)	81.600.000



No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Target	Rp
1.3.2	Sub Kegiatan pendataan dan pengolahan adm.kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 dokumen	36.500.000
1.3.3	Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang	196.500.000
1.4	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100,00%	450.000.000
1.4.1	Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	250.000.000
1.4.2	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	50.000.000
1.4.3	Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	150.000.000
1.5	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100,00%	1.703.455.962
1.5.1	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.503.455.962
1.5.2	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100.000.000
1.5.3	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100.000.000
1.6	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	5,00%	950.000.000
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	400.000.000
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	59 unit	250.000.000
1.6.3	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	300.000.000
1.7	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100,00%	900.000.000
1.7.1	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit (2 unit mobil, 1 unit motor)	150.000.000
1.7.2	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	250.000.000
1.7.3	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	500.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	indeks perlindungan budaya	74,43	3.275.000.000
		indeks pengembangan budaya	75,00	
		indeks pemanfaatan budaya	60,54	
2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	% Objek Budaya yang dinventarisir	76,20%	1.100.000.000
		% Objek Budaya yang direstorasi	74%	
		% Budaya yang dilestarikan	80%	



No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Target	Rp
2.1.1	sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	19 objek	900.000.000
2.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	3 orang	200.000.000
2.2	Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Seni yang dilestarikan	80,00%	1.225.000.000
		% Kelompok Seni yang Berprestasi	81,57%	
2.2.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	4 objek	470.000.000
2.2.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	12 laporan	755.000.000
2.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Lembaga Adat yang dibina	100,00%	950.000.000
2.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	200 orang	350.000.000
2.3.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 unit	600.000.000
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Indeks perlindungan budaya	74,43	700.000.000
3.1	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	% Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	62,41	700.000.000
3.1.1	Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 Objek	350.000.000
3.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	350.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA KAB/KOTA	Indeks Destinasi Pariwisata	77,53	3.750.000.000
4.1	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata	83	2.350.000.000
		Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan	88	
4.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematapan, revitalisasi)	6 Lokasi	2.200.000.000
4.1.2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000
4.2	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	77,12	350.000.000
		Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	54,11	



No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Target	Rp
4.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasaran yang tersedia dan Terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	4 unit	350.000.000
4.3	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	77,12	1.050.000.000
		Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	54,11	
4.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	500.000.000
4.3.2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000
4.3.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Laporan	450.000.000
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Indeks Pemasaran Pariwisata	63,51	3.400.000.000
5.1	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Ketertarikan atas Produk Wisata	79,93	3.400.000.000
		Persentase Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif	75,05	
		Persentase Tindakan atas Produk Wisata	75,63	
5.1.1	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri/	2 dokumen	800.000.000
5.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri	3 laporan	1.300.000.000
5.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	1.300.000.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Indeks Kemitraan Pariwisata	78,36	300.000.000
6.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) yang tersedia	12,5%	300.000.000



No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Target	Rp
6.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 unit	300.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Indeks Kemitraan Pariwisata	78,36	1.520.000.000
7.1	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Desa Wisata yang Atraktif	90,12	1.520.000.000
		Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif	91,67	
		Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	80,23	
		Persentase Peningkatan Serifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	79,77	
7.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya.	30 orang	300.000.000
7.2	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	160 orang	600.000.000
7.3	Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa).	40 orang	550.000.000
7.4	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	70.000.000
TOTAL				21.728.588.662



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPARBUDAYA

Rencana Kerja dan Pendanaan DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2024 terdapat 6 Program 15 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang dapat disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :



TABEL 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA
SESUAI DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR : 050-5899 TAHUN 2021

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				8.783.588.662	APBD	-		8.946.947.528
							Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	27,37%				26,25%	
							Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		16,90%				17,10%	
							Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0%				0%	
							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		60%				65%	
							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		3				4	
							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100%				100%	



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka	100,00%	150.000.000	APBD	-	100,00%	165.000.000
							Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar		100,00%				100,00%	
5	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja Perangkat Daerah		14 dokumen	75.000.000	APBD	-	14 dokumen	82.500.000
5	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14 dokumen	75.000.000	APBD	-	12 dokumen	82.500.000
5	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Kab. Bangka	100,00%	4.315.532.700	APBD	-	100,00%	4.747.085.970
5	01	01	2	02	01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 orang	4.210.532.700	APBD	-	32 orang	4.631.585.970
5	01	01	2	02	03	Sub kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	55.000.000	APBD	-	12 dokumen	60.500.000
5	01	01	2	02	07	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD		18 laporan	50.000.000	APBD	-	18 laporan	55.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap	Kab. Bangka	100,00%	314.600.000	APBD	-	100,00%	346.060.000
						persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100,00%		100,00%					
						persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50%		50%					
5	01	01	2	05	02	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		2 paket (pakaian olahraga 16 stel, pdh 82 stel)	81.600.000	APBD	-	1 paket (pakaian olahraga 16 stel)	89.760.000
5	01	01	2	05	03	Sub Kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		11 dokumen	36.500.000	APBD	-	11 dokumen	40.150.000
5	01	01	2	05	09	Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		16 orang	196.500.000	APBD	-	16 orang	216.150.000
5	01	01	2	06		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	Kab. Bangka	100,00%	450.000.000	APBD	-	100,00%	495.000.000
5	01	01	2	06	09	Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	250.000.000	APBD	-	12 dokumen	275.000.000
5	01	01	2	06	10	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 dokumen	50.000.000	APBD	-	12 dokumen	55.000.000
5	01	01	2	06	11	Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 dokumen	150.000.000	APBD	-	12 dokumen	165.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2	08		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Kab. Bangka	100,00%	1.703.455.962	APBD	-	100,00%	1.873.801.558
5	01	01	2	08	01	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	1.503.455.962	APBD	-	12 laporan	1.653.801.558
5	01	01	2	08	02	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	100.000.000	APBD	-	12 laporan	110.000.000
5	01	01	2	08	04	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	100.000.000	APBD	-	12 laporan	110.000.000
5	01	01	2	07		Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	Kab. Bangka	5,00%	950.000.000	APBD	-	5,00%	330.000.000
5	01	01	2	07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		2 unit	400.000.000	APBD	-	0 unit	-
5	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		59 unit	250.000.000	APBD	-	0 unit	-
5	01	01	2	07	06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		15 unit	300.000.000	APBD	-	15 unit	330.000.000
5	01	01	2	09		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Bangka	100,00%	900.000.000	APBD	-	100,00%	990.000.000
5	01	01	2	09	02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 unit (2 unit mobil, 1 unit motor)	150.000.000	APBD	-	3 unit (2 unit mobil, 1 unit motor)	165.000.000
5	01	01	2	09	06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 unit	250.000.000	APBD	-	50 unit	275.000.000
5	01	01	2	09	09	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	500.000.000	APBD	-	2 unit	550.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	indeks perlindungan budaya	Kab. Bangka	74,43	3.275.000.000	APBD	-	74,43	3.602.500.000
					indeks pengembangan budaya		75,00		75,70					
					indeks pemanfaatan budaya		60,54		73,70					
2	22	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Objek Budaya yang dinventarisir	Kab. Bangka	76,20%	1.100.000.000	APBD	-	77,10%	1.210.000.000
					% Objek Budaya yang direstorasi		74%		74,05%					
					% Budaya yang dilestarikan		80%		81,00%					
2	22	02	2	01	01	sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan		19 objek	900.000.000	APBD	-	19 objek	990.000.000
2	22	02	2	01	02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan		3 orang	200.000.000	APBD	-	3 orang	220.000.000
2	22	02	2	02		Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Seni yang dilestarikan	Kab. Bangka	80,00%	1.225.000.000	APBD	-	81,30%	1.347.500.000
					% Kelompok Seni yang Berprestasi		81,57%		82,00%					
2	22	02	2	02	01	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan		4 objek	470.000.000	APBD	-	4 objek	517.000.000
2	22	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		12 laporan	755.000.000	APBD	-	12 laporan	830.500.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Lembaga Adat yang dibina	Kab. Bangka	100,00%	950.000.000	APBD	-	100,00%	1.045.000.000
2	22	02	2	03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		200 orang	350.000.000	APBD	-	200 orang	385.000.000
2	22	02	2	03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		2 unit	600.000.000	APBD	-	2 unit	660.000.000
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Indeks perlindungan budaya	Kab. Bangka	74,43	700.000.000	APBD	-	74,43	770.000.000
2	22	05	2	02		Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	% Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kab. Bangka	62,41	700.000.000	APBD	-	62,41	770.000.000
2	22	05	2	02	01	Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		13 Objek	350.000.000	APBD	-	13 Objek	385.000.000
2	22	05	2	02	02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		2 Objek	350.000.000	APBD	-	2 Objek	385.000.000
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA KAB/KOTA	Indeks Destinasi Pariwisata	Kab. Bangka	77,53	3.750.000.000	APBD	-	77,60	4.125.000.000
3	26	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata	Kab. Bangka	83	2.350.000.000	APBD	-	83	2.585.000.000
						Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan			88				88	
3	26	02	2	01	03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)		6 Lokasi	2.200.000.000	APBD	-	6 Lokasi	2.420.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	26	02	2	01	04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1 Dokumen	150.000.000	APBD	-	1 Dokumen	165.000.000
3	26	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	Kab. Bangka	77,12	350.000.000	APBD	-	77,12	385.000.000
							Persentase Sarana yang Memenuhi Standar		54,11				54,11	
3	26	02	2	02	04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasaran yang tersedia dan Terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		4 unit	350.000.000	APBD	-	4 unit	385.000.000
3	26	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	Kab. Bangka	77,12	1.050.000.000	APBD	-	77,12	1.155.000.000
							Persentase Sarana yang Memenuhi Standar		54,11				54,11	
3	26	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		1 Unit	500.000.000	APBD	-	1 Unit	550.000.000
3	26	02	2	03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100.000.000	APBD	-	1 Dokumen	110.000.000
3	26	02	2	03	06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota		3 Laporan	450.000.000	APBD	-	3 Laporan	495.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Indeks Pemasaran Pariwisata	Kab. Bangka	63,51	3.400.000.000	APBD	-	64,00	3.740.000.000
3	26	03	2	01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Ketertarikan atas Produk Wisata	Kab. Bangka	79,93	3.400.000.000	APBD	-	79,93	3.740.000.000
							Persentase Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif		75,05				75,05	
							Persentase Tindakan atas Produk Wisata		75,63				75,63	
3	26	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri/		2 dokumen	800.000.000	APBD	-	2 dokumen	880.000.000
3	26	03	2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri		3 laporan	1.300.000.000	APBD	-	3 laporan	1.430.000.000
3	26	03	2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		2 dokumen	1.300.000.000	APBD	-	2 dokumen	1.430.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	26	04				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Indeks Kemitraan Pariwisata	Kab. Bangka	78,36	300.000.000	APBD	-	78,50	330.000.000
3	26	04	2	01	01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) yang tersedia	Kab. Bangka	12,5%	300.000.000	APBD	-	25,0%	330.000.000
3	26	04	2	01	01	Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1 unit	300.000.000	APBD	-	1 unit	330.000.000
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Indeks Kemitraan Pariwisata	Kab. Bangka	78,36	1.520.000.000	APBD	-	78,50	1.672.000.000
3	26	05	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Desa Wisata yang Atraktif	Kab. Bangka	90,12	1.520.000.000	APBD	-	90,12	1.672.000.000
					Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif		91,67		91,67					
					Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		80,23		80,23					
					Persentase Peningkatan Serifikat Kompetensi Bidang Pariwisata		79,77		79,77					
3	26	05	2	01	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya.		30 orang	300.000.000	APBD	-	30 orang	330.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	26	05	2	01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		160 orang	600.000.000	APBD	-	160 orang	660.000.000
3	26	05	2	01	03	Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa).		40 orang	550.000.000	APBD	-	40 orang	605.000.000
3	26	05	2	01	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 dokumen	70.000.000	APBD	-	1 dokumen	77.000.000
										21.728.588.662				23.186.447.528

**BAB V**
PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap kepala perangkat daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berpedoman pada RENSTRA Perangkat daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2024. Renja DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka selain menjadi Acuan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DINPARBUDAYA. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka. Renja juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan beserta seluruh staf DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Sungailiat, Desember 2022

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka



Rismy Wiramadonnah, S.STP, M.Si
NIP.19830324 200112 2 001